

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan padat penduduk dimana di wilayah perkotaan lebih banyak penduduk dari desa maka dari itu masyarakat yang berada di wilayah perkotaan memiliki pikiran bersaing lebih kuat untuk meningkatkan taraf kehidupannya dengan mengikuti zaman, sedangkan masyarakat di perdesaan berkarakter khas orang desa yaitu gotong-royong dan masyarakat desa mayoritas tidak mempunyai karakter untuk bersaing dengan masyarakat lainnya untuk memperbaiki taraf kehidupan mengikuti zaman. Karena hal ini pembangunan belum terlaksana dengan rata sempurna sehingga wilayah perdesaan masih tertinggal dengan perkembangan wilayah kota, hal ini menyebabkan terpengaruhnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah sehingga menyebabkan tingkat pengangguran yang meningkat dimana pengangguran itu sendiri merupakan faktor penghambat kesejahteraan masyarakat.

Apabila Sumber Daya Manusia berkualitas tinggi maka akan menghasilkan tingkat produksi yang tinggi dan mempunyai sifat mandiri untuk mencukupi apa yang dibutuhkan dikehidupannya dengan kata lain bahwa manusia bisa sendiri tanpa bergantung terhadap pihak luar untuk mencukupi apa yang dibutuhkan dikehidupannya. Berbeda dengan Sumber Daya Manusia yang tinggi, Sumber Daya Manusia dengan tingkat menengah kebawah mereka sangat bergantung dengan pihak luar baik dari pemerintah ataupun masyarakat lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, bantuan ini harus bisa mendidik untuk menjadikan masyarakat menjadi mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu dibutuhkan bantuan yang mampu mendidik seperti dilakukannya pemberdayaan masyarakat hal ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tindakan yang mampu membangun ekonomi dengan tetap menggunakan nilai-nilai sosial, pemberdayaan merupakan cara yang bisa dilakukan untuk membantu dan memberi dukungan meningkatkan kepercayaan untuk memutuskan keputusan dan memilih tindakan apa yang ingin mereka lakukan untuk terlepas dari keterbelakangan dan kemiskinan atau bisa disebut pemberdayaan merupakan upaya memaksimalkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, dalam pemberdayaan masyarakat bisa dipertimbangkan dengan melihat sisi menciptakan suasana yang bisa memungkinkan untuk masyarakat berkembang, menguatkan

kemampuan dari masyarakat sendiri, melakukan pemberdayaan dengan senantiasa memberikan perlindungan masyarakat.

Adapun beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuan seperti berwirausaha, berternak, bertani, dan melalui mengorganisasikan masyarakat seperti mengelola dan mengatur program yang akan dilakukan namun masyarakat masih kurang minat di bidang kewirausahaan karena minimnya pengetahuan mereka dan belum tersedianya ide usaha apa yang mampu mereka lakukan maka dari itu masyarakat harus mendapatkan arahan, bimbingan, dan fasilitas untuk menjadi masyarakat yang produktif dan kreatif untuk mengembangkan minat berwirausaha mengikuti berkembangnya peradaban. Kewirausahaan merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan wirausaha, kewirausahaan merupakan proses menciptakan ide, inovasi, dan mengerjakan sesuatu yang baru untuk menciptakan peluang baru di kehidupan sehari-hari yang bernilai. Konsep *Collaborative Governance* merupakan cara alternatif yang di klaim mampu mengatur satu atau lebih lembaga publik yang ikut serta berkolaborasi dengan stakeholder yang berkepentingan non publik dalam upaya mengambil keputusan bersama atau kolektif yang bersifat resmi, tersepakati, mengarah, dan bermusyawarah dengan tujuan melakukan kebijakan dalam mengelola program ataupun aset publik (Febrian, 2016).

Desa Prajegan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan detail sebelah barat Desa Gegeran, sebelah timur Desa Serangan, sebelah utara Desa Kedung Banteng, dan sebelah selatan Desa Gelang Lor. Desa Prajegan memiliki luas wilayah 626,7 ha dengan penduduk berjumlah 6.225 dengan 2.340 Kepala Keluarga. Seperti umumnya Desa lain, Desa Prajegan berkarakteristik persawahan dan perbukitan yang menyebar rata diseluruh wilayah desa, dengan karakter seperti itu Desa ini menjadi lebih menarik dengan panorama alamnya, adapun pasar di desa ini yang mampu menjadi tempat perekonomian untuk memajukan perekonomian di desa ini. Desa Prajegan mempunyai Sumber Daya Manusia yang bisa dibilang kreatif dan mencintai budayanya karena dengan kreativitasnya mereka mampu memiliki beberapa kesenian yang baik dan cukup dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Ponorogo seperti kesenian Ketoprak Ngesti Budoyo, Reog Singo Taruno Mudo, Reog Singo Makmur, Seni Gajah Ki Hasan Rifa'i, Seni Gajah Giri Suci, Karawitan Ngesti Laras, Seni Ludruk Irama Muda, Seni Habsi, Campursari dan Angklung Suryo Pandowo. Tidak hanya kreativitas di bidang kesenian, masyarakat Desa Prajegan juga baru-baru ini menciptakan bisnis kreatif yang juga terkenal di kalangan masyarakat Kabupaten Ponorogo, terdapat sektor bisnis bidang ekonomi seperti Sektor jasa dimana sektor jasa ini memiliki beberapa unit seperti

pembayaran Pajak kendaraan bermotor, Event organizer, dan pembayaran listrik, Sektor kedua merupakan bidang produksi seperti usaha distro dan sablon, dan memiliki Sektor Hiburan.

Desa Prajegan juga memiliki cafe dan pemancingan menjadi satu selain itu kini masyarakat menambah bisnis baru lagi yang mengikuti perkembangan zaman dan trend yaitu bisnis pembibitan bunga karena kini pemerintah gencar mengadakan program reboisasi atau penghijaun maka masyarakat Desa Prajegan tidak mau ketinggalan untuk ikut antusias dengan menambahkan usaha tersebut karena otomatis akan banyak yang membutuhkan tanaman bunga, ada beberapa jenis bunga yang tersedia seperti Bunga Jacaranda, Bunga Flamboyan, Bunga Tabebuaya dan masih banyak lagi. Beberapa waktu lalu pihak Djarum mengadakan kegiatan yang bekerja sama dengan Desa Prajegan mengadakan acara “76 Pasar Heppiii” dengan beberapa acara seperti pasar rakyat, Volly Heppii, Njagong Budaya, Live Music, dan Community Meet Up yang diadakan di lapangan Desa Prajegan, acara tersebut dapat dinikmati dengan membeli kupon terlebih dahulu di Sub-katar ataupun di Kantor Bumdes Prajegan Sumringah.

Menurut penjabaran diatas dalam menciptakan ekonomi kreatif tadi tentunya membutuhkan dukungan dari pihak pemerintah ataupun pihak luar pemerintah seperti bekerjasama dengan Pemerintahan Desa itu sendiri, Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan adapun pihak swasta yang mampu digandeng oleh Desa Prajegan untuk ikut serta dalam menciptakan program ekonomi kreatif seperti PT. Djarum. Sebelum terciptanya ekonomi kreatif tersebut tentunya mereka mendapat arahan, modal ataupun fasilitas yang mampu menunjang terciptanya dan berjalannya ekonomi kreatif tersebut. Berdasarkan penjabaran diatas mampu menjadi pertimbangan bagi penulis untuk meneliti dan mengkaji lanjut perihal

“ Collaborative Governance Dalam Menciptakan Ekonomi Kreatif Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari masalah yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Siapa saja yang terlibat dalam program ekonomi kreatif di Desa Prajegan
2. Bagaimana praktik kolaborasi pada program ekonomi kreatif tersebut?

3. Bagaimana dampak dari program ekonomi kreatif tersebut bagi masyarakat Desa Prajegan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pihak apa saja yang terlibat dalam program ekonomi kreatif
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik kolaborasi dengan pemerintah dalam menciptakan bisnis kreatif yang berada di Desa Prajegan .
3. Untuk menganalisis bagaimana dampak dari kegiatan bisnis kreatif tersebut bagi masyarakat Desa Prajegan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat ataupun kegunaan dari penelitian yang dilakukan untuk :

1. Secara Teoritis

- a. Manfaat terdapatnya penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan terkait kegiatan ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh Collaborative Governance Desa Prajegan.
- b. Selanjutnya manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan terkait dengan bentuk usaha kreatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan kepada masyarakat dan juga kepada semua pihak yang membaca terkait Collaborative Governance dalam menciptakan kegiatan ekonomi kreatif.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait dampak yang dirasakan masyarakat karena kegiatan ekonomi kreatif di Desa Prajegan.

1.5 Penegasan Istilah

Penegasan Istilah adalah memperjelas sejumlah kata kunci agar terhindar dari kesalah pahaman pembaca maka diperlukannya penjelasan beberapa kata sebagai berikut :

a. Collaborative Governance

Collaborative Governance merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pihak pemangku kepentingan atau biasa disebut dengan istilah stakeholder dimanapihak yang mampu terlibat seperti masyarakat ataupun individu atau kelompok yang berperan dalam organisasi atau perusahaan yang saling terkait untuk merealisasikan tujuan bersama. Dalam pelaksanaan program dan menerapkan kebijakan pemerintah tidak berpangku tangan hanya mengandalkan terhadap daya internal yang dimiliki. Minimnya sumber daya, jaringan, dan skill mampu menjadi faktor pemerintah memerlukan kerjasama dengan pihak lain bisa dengan sesama pemerintah, dari swasta, dari masyarakat itu sendiri, dan komunitas masyarakat sipil dan nantinya bisa terciptanya kolaborasi guna merealisasikan tujuan bersama(Saputri, 2019).

b. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan kegiatan usaha yang menggunakan pemanfaatan ide, inovasi, kreativitas, dan bakat minat bagi setiap individu yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan trend yang sedang terjadi, karena masyarakat memang cenderung tertarik dengan sesuatu yang hal yang baru dan unik sehingga nantinya bisnis tersebut mampu berprogres dengan stabil dengan tetap menjaga daya tarik bisnis tersebut sehingga tetap menarik di kalangan masyarakat sehingga usaha tersebut senantiasa mempunyai nilai jual yang baik.

1.6 Landasan Teori

a. Collaborative Governance

1. Pengertian Collaborative Governance

Sebelum menjelaskan apa pengertian dari Collaborative Governance perlu juga untuk mengetahui lebih dulu apa definisi dari governance karena governance merupakan dasar dari konsep Collaborative Governance. Dalam program studi Ilmu Pemerintahan istilah governance dan government tersebut kerap sekali muncul namun walaupun dua istilah tersebut hampir sama namun terdapat arti atau definisi yang berbeda.

Menurut definisi dari Kooiman (2009:273) governance merupakan sebuah konsep mengenai interaksi dalam pemerintah dimana interaksi tersebut adalah hubungan yang saling menguntungkan oleh dua atau lebih pihak.

Menurut Keban (2008:38) menjelaskan apabila governance adalah sistem kebijakan, sistem nilai, dan kelembagaan yang dalam pengurusan sosial, politik, ekonomi langsung dikelola lewat interaksi masyarakat dengan pihak sektor swasta dan pihak pemerintah. Adapun 4 fase perkembangan paradigma di administrasi publik seperti fase :

1. Traditional Public Administration, ini berkiblat pada kontinuitas, legal-rational, otoritas, hirarki, profesionalitas, dan tidak memihak
2. Public Management, memfokuskan pada prinsip-prinsip manajemen dan efektivitas dan efisiensi untuk pemanfaatan sumber daya, sensitif dalam hal kepentingan umum, penyesuaian kekuatan pasar, dan pada pelanggan.
3. New Public Management, mengarah terhadap prinsip yang fleksibel, ide, fokus terhadap hasil, pemberdayaan, out-sourcing dan contract, mempromosikan etika saat berprofesi, anggaran, dan manajemen yang berbasis terhadap kinerja.
4. Governance, arti lain dari governance yaitu pemerintahan dengan keterangan suatu sistem nilai, lembaga yang dalam urusan sosial, ekonomi, politik diatur dengan interaksi dengan masyarakat, sektor wisata dan pihak pemerintah. Jika melihat pengelompokan Chemma paradigma yang sekarang dipakai untuk menyelenggarakan pemerintah adalah Paradigma Governance.

Sedangkan menurut UNDP atau United Nations Development Programme governance merupakan pelaku kewenangan dalam ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola masalah yang terjadi di suatu negara. Collaborative Governance merupakan susunan pemerintahan dengan melibatkan berbagai pihak dari government, private sector, dan civil society dalam pelaksanaan pemerintah menggunakan kerangka demokrasi dan egalitarisme yang menghasilkan tata kelola pemerintahan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya harus ada kerjasama antara masyarakat dan sektor swasta guna terwujudnya good governance.

Kolaborasi merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dimana dalam kesepakatan tersebut memuat penyatuan gagasan dengan maksud mencapai tujuan bersama hal tersebut sesuai dengan penjabaran mengenai definisi dari

kolaborasi dimana kolaborasi merupakan jaringan informasi, aktivitas, sumberdaya, dan kompetensi organisasi dalam dua ataupun lebih dalam melakukan kerjasama untuk tujuan bersama yang tidak bisa direalisasikan apabila dikerjakan sendiri-sendiri.

Menurut Dwiyanto (2015:253) menjelaskan apabila menjalankan kegiatan kerjasama kolaborasi harus ada sesuatu yang mampu mengikat masing-masing organisasi guna mencari jalan keluar terhadap permasalahan atau isu yang dimana permasalahan tersebut mengganggu kepentingannya. Dalam menjalankan kerjasama harus atas keinginan sendiri untuk mencari jalan keluar untuk masalah yang dirasakan semua organisasi dengan mitranya dari organisasi yang terletak di sektor privat, nantinya permasalahan ataupun tujuan bersama tersebut akan menjadikan acuan ataupun dorongan dalam berkembangnya kolaborasi organisasi publik dengan organisasi mitranya di sektor privat, bentuk baru dari pemerintahan kolaboratif lebih condong untuk memberi dinamika dengan redikasi dari pemahaman kita an praktek akuntabilitas di zaman modern.

Menurut Lemos & Agrawal (2006:297) collaborative governance tidak selalu terpaku terhadap stakeholder yang berisi pemerintah dan non pemerintah namun juga terbentuk dengan adanya multipartner governance yang terdiri dari bermacam sektor swasta maupun privat, komunitas sipil, dan warga masyarakat. Dibangun dengan terdapatnya sinergi peran stakeholder dan susunan rencana bersifat hybrid seperti kerjasama publik-privat-sosial.

Menurut Ansell and Gash (2007:545) mengemukakan bahwa Collaborative Governance merupakan tipe governance yang dimana pihak publik dan dan privat menjalankan kerjasama dengan cara yang khusus, dengan proses yang tertentu guna menetapkan hukum aturan untuk penentuan publik.

Sedangkan menurut Sudarmo (2011:102-104) collaboration dilihat sebagai bentuk reaksi organisasi dengan adanya perubahan atau pergeseran di lingkungan kebijakan. Yang dimaksud pergeseran bisa juga diukur dengan jumlah aktor kebijakan yang meningkat, isu makin melebar sehingga keluar dari batas normal, inisiatif spontan masyarakat meluas, dan kapasitas diluar pemerintah pusat dan daerah makin meningkat.

Dilihat dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* merupakan suatu paradigma baru dalam pemerintahan yang terdapat stakeholder, NGOs, sector business, dan masyarakat diikut sertakan dalam pengambilan keputusan, melakukan atau melaksanakan kebijakan, dan tata kelola pemerintahan secara umum. Tujuan dilakukannya pelibatan tersebut termasuk usaha untuk menyelesaikan masalah yang tidak memungkinkan apabila diselesaikan oleh satu pihak namun membutuhkan kekompakan untuk bekerjasama dari berbagai pihak sehingga dalam tujuannya mendapat keberhasilan dari kebijakan tersebut yang sesuai dengan tujuan bersama (Akbar, 2021).

2. Tujuan Penerepan Collaborative Governance

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tentunya membutuhkan upaya kolaborasi dimana terdapat alasan atau latar belakang memilihnya untuk berkolaborasi.

Menurut Junaidi (2015:8) *Collaborative Governance* tidak terbentuk secara tiba-tiba karena adanya dikarenakan inisiatif dari berbagai pihak pendorong dilakukannya koordinasi dan kerjasama untuk merampungkan permasalahan yang dihadapi publik.

Ansell dan Gash (2007:544) mengemukakan bahwa alasan penting menerapkan Collaborative Governance karena timbulnya respon kegagalan implementasi, memakan biaya yang besar, dan collaborative governance muncul dengan sengaja dan dibuat secara sadar dengan alasan dan konsep ini memang penting dilakukan sebagai berikut :

- a. Konflik dengan kelompok kepentingan yang sulit di redam
- b. Pengelompokan kelompok kepentingan
- c. Gagalnya penerapan kebijakan di lapangan
- d. Rumit dan kebergantungan antar institusi
- e. Biaya yang tinggi.

Dari pendapat diatas bisa disimpulkan bahwa kolaborasi dilakukan dikarenakan adanya saling ketergantungan dari setiap institusi, dengan diadakannya kolaborasi dapat mengelompokkan kelompok-kelompok kepentingan, kolaborasi juga dijadikan solusi karena buruknya suatu penerapan program yang dilakukan oleh satu lembaga

karena keterbatasan dari lembaga tersebut, selain itu kolaborasi bisa menjadi solusi untuk mengatasi tingginya biaya yang digunakan oleh suatu kegiatan (Akbar, 2021).

3. Prinsip Penerapan Collaborative Governance

Menurut Seigler (2011:968-970) menjelaskan bahwa ada delapan prinsip dalam menerapkan *Collaborative Governance* seperti :

1. Keterlibatan masyarakat dalam prosesnya
2. Pengelompokan sumber daya serta aset dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri
3. Program melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan orang yang berkompeten
4. Program melaksanakan musyawarah yang wajib dihadiri oleh masyarakat
5. Program melibatkan mitra kolaboratif yang sifatnya berlanjut
6. Program yang strategis
7. Program mampu mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan memecahkan permasalahan publik
8. Program diharuskan berisi tanggung jawab (akuntabilitas).

4. Model dan Proses dari Collaborative Governance

Beberapa ilmuwan merumuskan model kerja dari Collaborative Governance secara simple seperti model yang diawali dengan proses negoisasi, pertanggung jawaban dan pelaksanaan yang dilindungi oleh *assessment*.

Menurut Ansell dan Gash dalam (Fawwaz ,2017) dalam Collaborative Governance terdapat 4 variabel seperti :

1. Kondisi awal

Merupakan proses musyawarah yang membicarakan mengenai potensi yang ada di desa tersebut yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kondisi awal di kolaborasi ini dipengaruhi beberapa peristiwa seperti semua stakeholder mempunyai urusan ataupun kepentingan yang ingin dicapai

bersama, mempunyai sejarah dimasa lalu, mengormati kerjasama yang sedang dilakukan, saling percaya terhadap stakeholder yang lain, tidak seimbangnyanya dari skill, wawasan dan sumber dayanya.

2. Bentuk kelembagaan

Merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor baik dari pemerintah ataupun non pemerintah yang mewajibkan untuk terlibat secara langsung dalam hal pembuatan dan pengambilan keputusan tentang kebijakan pemerintah dengan tujuan mampu mempermudah pemberian pelayanan publik, menyediakan dan mengolah asset publik. Diharapkan juga dari setiap pemangku kepentingan ikut andil dalam hal negosiasi, musyawarah, dan perolehan bersama. Desain kelembagaan ini saling berkaitan mengenai tahapan dan peraturan dalam proses kolaborasi yang bersifat legal dan transparan.

3. Kepemimpinan

Merupakan cara mengatur, mengelola, dan mengendalikan putusan yang berkaitan mengenai urusan publik. Dalam hal ini kepemimpinan juga sangat berpengaruh dalam proses merangkul, pemberdayaan dan mengajak pemangku kepentingan dengan tujuan tercapainya kolaborasi yang sukses. Kepemimpinan yang bersifat fasilitatif mempunyai kaitan dengan permusyawarahan yang dilakukan stakeholder dengan harapan dapat membuat kebijakan, dapat membangun saling percaya, menyediakan dialog bagi para stakeholder dan pembagian keuntungan bersama.

4. Proses kolaboratif

Proses ini merupakan pelaksanaan dari program kolaboratif yang melibatkan semua stakeholder dalam semua upaya membuat keputusan. Bagian ini termasuk paling penting dimana proses kolaboratif dimulai dengan dialog tatap muka dengan harapan bisa membangun kepercayaan dengan baik, setelah itu didapat maka selanjutnya dapat mempengaruhi kualitas dari komitmen dalam kolaborasi, terbentuk pemahaman untuk merumuskan permasalahan, mengidentifikasi nilai dan misi dengan jelas, dan

terakhir mereka akan menentukan strategi yang strategis untuk melaksanakan kolaborasi (Haryono, 2012; Ode, Islamy, Andriani, & Purnama, 2020).

Model selanjutnya ini bernama *cross sector collaboration* dimana model ini termasuk model yang cukup dikenal dan dipopulerkan oleh Bryson dan Crosby (2006:44-45) dimana model ini terdiri dari *initial condition, structure and governance, process, contingencies and constraints, outcomes dan accountabilities*. Dari konsep ini adapun titik fokus yang mengeksplor sisi prosesnya yang terdiri dari :

1. Forging agreements yakni proses menyepakati kerjasama oleh semua stakeholder
2. Building leadership yakni keharusan adanya kepemimpinan dengan maksud sebagai komite dari proses kerjasama nanti
3. Building legitimasi yakni pentingnya membentuk legitimasi dengan keberadaan dari struktur, proses, dan siasat yang signifikan dengan lingkungan kerjasama
4. Building trust yakni pentingnya membentuk kepercayaan dengan sesama stakeholder
5. Managing conflict yakni mengolah bentrokan atau permasalahan yang ada
6. Planning merupakan hal terpenting dalam penentuan tujuan, visi, misi, pelaksanaan dan keterlibatan dari berbagai stakeholder sehingga planning ini nantinya mampu menentukan sebagaimana keberhasilan dari dilakukannya kolaborasi ini (Harmawan, Bagus Nauri Studi et al., 2016).

5. Faktor yang mempengaruhi Collaborative Governance

Emerson dan Nabatchi dalam (Ulfa, 2018) menyebutkan bahwa kolaborasi mampu berjalan sukses karena mampu bertindak kolektif. Kerangka kolaborasi merupakan bagian yang penting dan membutuhkan support yang berkelanjutan dari berbagai aktor dalam collaborative governance. Berikut bentuk dari kemampuan bersama :

1. Kesepakatan Procedural, merupakan bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan dari pihak satu ke pihak lainnya, pihak yang melakukan

kesepakatan ini bertugas menjadi pembujuk yang istimewa karena mampu membuat target mengiyakan sebuah kesepakatan yang ditawarkan oleh pihak yang melakukan kesepakatan seperti politisi, negosiator yang profesional, pelobi politik, dan lain-lain.

2. Intistusional itu sendiri mampu membuat pengaruh dalam kolaborasi jika pihak yang mempunyai kepentingan melakukan koordinasi terbuka dan bisa menerima segala harapan dari masyarakat dari awal dilakukannya proses kolaborasi sampai berjalannya kolaborasi.
3. Pengetahuan Sumber Daya Manusia termasuk hal yang berpengaruh terhadap proses kolaborasi karena pihak yang ikut dalam kolaborasi menguasai bidang yang nantinya menjadi tugasnya untuk bertanggung jawab sehingga nantinya proses kolaborasi berjalan dengan semaksimal mungkin.
4. Kepemimpinan merupakan hal yang utama karena seorang pemimpin akan menjadi pengatur, insiator, mengelola, dan mengatur bagaimana kolaborasi berjalan.

Dalam berjalannya kolaborasi tentu menemui penghambat menurut Government of (Canada, 2008) dan (Sudarmo, 2011) dikarenakan berbagai faktor seperti :

1. Faktor Institusi, kolaborasi dapat gagal apabila terdapat institusi-institusi yang melakukan kolaborasi terutama dari pihak pemerintah menerapkan struktur hierarkis terhadap institusi lain yang menggunakan struktur vertical, dengan begitu akuntabilitas dari institusi dan arah kebijakan pun bersifat vertical dan hal tersebut tidak cocok apabila melaksanakan kolaborasi dikarenakan proses kolaborasi masyarakat mempunyai cara kerja atau pengorganisasiannya bersifat horizontal antara pemerintah dengan non pemerintah.
2. Faktor Budaya, kolaborasi dapat gagal apabila ditemukannya kecenderungan budaya ketergantungan terhadap prosedur dan tidak berani untuk mengambil gebrakan atau jalan pintas. Dalam menciptakan kolaborasi yang baik maka para pelaku pelayanan publik harus mempunyai skill dan kesanggupan untuk masuk ke mitra dengan pragmetik yaitu memusatkan terhadap hasil walaupun nantinya akan mengabaikan kebenaran karena akan melakukan

upaya apapun untuk sebuah kolaborasi, namun diberlakukannya dalam pelayanan publik yang sangat bergantung oleh prosedur akan menghambat kolaborasi dan nantinya akan menghambat kemajuan dari kolaborasi, intinya sifat bergantung terhadap prosedur dan tidak berani mengambil resiko merupakan hambatan untuk terlaksananya efektivitas dari kolaborasi.

3. Faktor Politik, kolaborasi dapat gagal apabila minimnya inovasi dari pemimpin untuk merealisasikan tujuan dari politik yang kompleks dan kontradiktif, faktor lain yang membuat gagalnya dari kolaborasi adalah berubahnya kesepakatan dan kepentingan yang berbeda dari para stakeholder yang terlibat (Akbar, 2021).

b. Ekonomi Kreatif

John Howkins pada tahun 2001 menjelaskan bahwa ekonomi kreatif didefinisikan sebagai kegiatan kreatif, lingkungan, dan warisan budaya sebagai pijakan di masa yang akan datang. Ekonomi kreatif juga bisa disimpulkan kegiatan produktif yang berasal dari orang yang mengandalkan pengetahuan yang dimiliki dan mereka yang mempunyai kreatifitas. Dalam konteks ekonomi kreativitas merupakan perumusan atas ide baru dan dalam penerapannya menghasilkan kegiatan yang berasal dari produk seni budaya, pengetahuan, dan menerapkan ilmu teknologi.

Ekonomi kreatif itu sendiri berasal atau tumbuh dari masyarakat yang kreatif yang mereka bisa menumbuhkan kompetensi sebagai modal penting dalam menciptakan produk baik berupa barang maupun jasa yang mempunyai nilai jual. Adapun aspek ekonomi yang perlu dipahami yakni partisipasi dalam wirausaha, meningkatkan produktivitas, penggerak inovasi, dan pendorong dalam penumbuhan ekonomi. Dalam pemahaman yang lebih luas ekonomi kreatif merupakan konsep menyeluruh yang berkaitan langsung dengan korelasi yang berjaln dari budaya dengan ekonomi, dan teknologi untuk menghadapi global yang mempunyai dominan terhadap inspirasi, imajinasi, teks, dan simbol. Dari definisi tersebut adapun tiga konsep dari kreativitas ekonomi yaitu :

1. Kreativitas ekonomi adalah hasil kerja sama untuk menciptakan hal lama dengan proses yang baru
2. Kreativitas ekonomi merupakan cara menggunakan sesuatu yang sederhana

3. Kreativitas ekonomi merupakan proses menciptakan kembali sesuatu yang sudah tidak ditemukan atau tidak ada

Secara garis besar ekonomi kreatif merupakan industri kreatif yang melaksanakan proses penciptaan dengan melakukan penelitian dan pengembangan lebih dahulu. Ketahanan industri kreatif itu sendiri terletak pada riset dan pengembangan guna menciptakan barang maupun jasa baru yang bersifat komersil.

Adapun UNESCO menjelaskan bahwa industri kreatif merupakan industri yang mengolaborasi produksi, kreativitas, komersialisasi atau penciptaan barang dagangan baik tidak terwujud (intangible) maupun cultural yang terjadi secara alamiah. Ekonomi kreatif sendiri mempunyai peran dalam perekonomian suatu negara dalam menciptakan lapangan kerja, menambah pendapatan, peningkatan dalam bidang ekspor, menambah kekayaan intelektual dan masih banyak lagi peran lainnya. Maka dari itu ekonomi kreatif mampu dinilai sebagai pendorong dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara (Mustanir, Muhammadiyah, & Rappang, 2019).

1.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional dilakukan guna pemberian batas ruang lingkup variabel yang akan diteliti, mengarahkan dalam pengukuran atau pengamatan secara cermat dalam suatu objek yang akan dibahas. Definisi Operasional itu sendiri dilakukan dengan tujuan menghindari adanya salah paham dalam pengumpulan informasi ataupun data yang hendak dicari dan memberikan penjelasan variabel apa saja yang timbul dari penelitian secara spesifik (Rati, 2006).

Definisi Operasional dalam penelitian ini dapat dikategorikan dengan 2 variabel seperti :

1. **Managing Aims**, aims atau bisa disebut goals merupakan alasan besar terlaksananya kolaborasi. Menurut Huxxham dan Vangen terdapat tiga level tujuan seperti : meta goals (posisi top level) merupakan pernyataan yang jelas mengenai tujuan apa yang hendak diraih, Penjelasan kepentingan yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang ikut terlibat, Penjelasan tujuan dari perseorangan dari masing organisasi. Managing Aims terdiri dari :
 - a. Tujuan kerjasama, dalam melaksanakan program Kolaborasi ini tentunya dibentuk karena memiliki tujuan dalam pelaksanaan kolaborasi, dalam hal ini masyarakat Desa Prajegan mempunyai tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan dalam hal tersebut pihak yang ikut berkolaborasi juga mendapatkan tujuan mereka yaitu mendapat keuntungan dari kolaborasi tersebut.

- b. Penjabaran kepentingan, dalam penjabaran kepentingan ini mereka selaku pemerintah Desa memberikan tanggung jawab penuh kepada BUMDesa, Koperasi, dan Karang taruna namun Pemerintah Desa dan Pemangku kepentingan tetap mengawasi terlaksananya program tersebut agar tetap berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan hasil yang baik untuk kesejahteraan bersama.

2. **Compromise**, kompromi digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan dari cara kerja, gaya kerja masing masing, nilai organisasi, norma-norma, dan tradisi. Kompromi dibuat dengan cara membuat jalan tengah yang menjadi bantuan pihak lain dan mampu menghilangkan pemikiran buruk pada pihak yang lain. Compromise disini dijelaskan :

- a. Menciptakan kesepakatan jalan tengah, untuk terlaksananya program Collaborative Governance ini berjalan baik dengan meminimalisir terjadinya kesalah pahaman mereka membuat kesepakatan bahwa dalam kolaborasi masyarakat desa harus terlibat secara langsung dalam program ekonomi kreatif dan dijalankan secara transparan.

Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo terdapat kegiatan ekonomi yang maju dan menambah kreativitas bagi masyarakatnya, dalam kegiatan ekonomi tersebut Desa Prajegan melakukan sistem kolaborasi atau dalam Ilmu Pemerintahan disebut dengan istilah “Collaborative Governance” dimana pihak desa bekerjasama atau berkolaborasi dengan pihak lain baik pihak swasta, komunitas, maupun instansi lain yang mempunyai tujuan bersama.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bentuk mendapat data atau informasi yang lengkap dan akurat, pembahasan mengenai metode penelitian ini meliputi seperti (Satria & Redhani, 2020) :

1. Jenis Penelitian

Untuk penelitian ini peneliti memakai metode Penelitian Kualitatif yang dilakukan di Desa Prajegan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini peneliti

mendapat data dengan melakukan proses wawancara yakni mewawancarai informan untuk menanyakan perihal yang berkaitan mengenai permasalahan yang hendak dicari, dan melakukan dokumentasi dengan para narasumber . Dalam hal menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisa oleh Milles dan Huberman dalam Sugiono yang terdiri 3 macam tahapan yaitu Reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (Suwaryo, Sarwono, & Yuwono, 2020).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dipilihnya tempat ini karena peneliti beranggapan bahwa Desa Prajegan termasuk desa yang tergolong maju dan memiliki suatu inovasi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif yang maju sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana *“Collaborative Governance Dalam Menciptakan Ekonomi Kreatif Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”*.

3. Teknik Pengambilan Informan

Dalam penentuan informan ini menggunakan teknik purposive sampling yakni dilakukan dengan berdasarkan tujuan dari penelitian itu sendiri. Purposive sampling itu sendiri merupakan teknik pengambilan informan dengan sengaja yang dinilai mampu untuk menyampaikan informasi dan data yang sebenar-benarnya. Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua Karang Taruna, beberapa masyarakat Desa Prajegan dan alasan mengapa peneliti memilih informan ini dikarenakan peneliti menganggap bahwa informan tadi dianggap memahami permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti nantinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam wawancara ini termasuk metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung dengan informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pendukung untuk penelitian yang dilaksanakan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, dengan cara melakukan perekaman ataupun mencatat data dari arsip-arsip ataupun informasi yang ada kaitannya dengan data penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data yang dianalisis dengan cara kualitatif, seperti apapun yang disampaikan informan secara lisan ataupun tertulis serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Analisis Data adalah kegiatan merubah data yang sudah diperoleh yang bertujuan guna menemukan informasi yang bermanfaat yang nantinya bisa memberi petunjuk pengambilan keputusan dengan permasalahan yang diangkat (Erlianti, 2019).

Berikut tahapan dalam menganalisis data :

1. Pengumpulan Data

Kegiatannya yakni menjadikan satu data lokasi penelitian yang dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara, disini mulai memilih titik fokus pendalaman data untuk proses penggalian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Proses memilih, mensortir, melakukan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi terhadap data kasar yang ada dilapangan dan diteruskan saat pengumpulan data, maka dari itu reduksi data dapat dilakukan mulai dari peneliti fokus di wilayah penelitian.

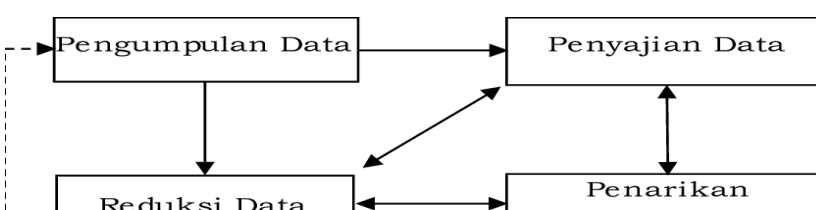
3. Penyajian Data

Penyusunan rangkaian informasi setelah itu menyimpulkan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data berbentuk uraian singkat dan perencanaan penelitian selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Dalam pengumpulan data penarikan kesimpulan merupakan menyimpulkan data yang sudah ditampilkan, dan diharapkan menemukan temuan baru yang belum ada ditampilkan sebelumnya (Syafuruddin, 2020).

Berikut Skema Analisa Data menurut (Milles dan Huberman 1992:20)



Gambar 1. Skema Analisa Data

6. Teknik Keabsahan Data

Dalam hal memeriksa keabsahan data selain untuk penyanggahan kepada penelitian kualitatif yang mengutarakan tidak ilmiah, memeriksa keabsahan juga unsur penting yang tidak bisa lepas dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data ini juga bentuk pembuktian bahwa penelitian ini bertujuan guna membuktikan apa yang diamati sesuai dengan yang sesungguhnya ada diobjek tersebut. Untuk mendapat keabsahan data maka diperlukan teknik pemeriksaan guna mendapat informasi yang absah, maka dari itu penulis menggunakan teknik triangulasi, perpanjangan, pengamatan, kecukupan referensi dan diskusi dengan teman sejawat (Ramdhani, Yuliastri, Sari, & Hasriah, 2019).

a. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau dijadikan pembanding untuk data itu, dan teknik Triangulasi yang sering digunakan adalah memeriksa sumber lain. Triangulasi sumber ialah mengecek data-data yang didapatkan dari informan dengan cara menanyakan tentang kebenaran dari informasi ataupun data yang didapat dari informan yang satu dengan yang lainnya. Triangulasi untuk pengujian kredibilitas itu guna mengecek dari dari berbagai sumber dengan bermacam cara dan waktu, untuk penelitian ini peneliti menggunakan model Triangulasi seperti: (Hadi, 2017).

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data hal yang dilakukan seperti mengecek data yang sudah didapatkan dari berbagai sumber, data ini didapatkan dari berbagai informan yang akan dibandingkan guna penguatan data(UIN Malang, 2010).

2. Triangulasi Metode

Triangulasi model ini dilakukan dengan bermacam teknik untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data yang sama antara metode observasi, dokumentasi, maupun wawancara dan nantinya akan dicek dengan hasil penelitian perihal masalah yang dibahas.

3. Triangulasi Data

Cara yang digunakan bisa dengan bermacam teknik pengumpulan data dengan bersamaan guna mendapatkan informasi yang serupa dengan data yang sedang diteliti

b. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan Pengamatan disini merupakan peneliti mengamati dan mengecek ulang mengenai data yang diberikan akurat atau belum, dan apabila data yang didapatkan belum akurat maka peneliti akan mengulangi pengamatan lebih dalam sehingga mendapatkan data yang benar akurat. Pada tahap awal meneliti, peneliti masih dianggap orang asing sehingga informan belum mempercayai peneliti untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan terperinci. Dilakukannya Perpanjangan Pengamatan ini guna meningkatkan kredibilitas data, dengan begitu dalam perpanjangan pengamatan nanti juga akan meningkatkan hubungan peneliti dengan informan semakin terbuka sehingga akan dipercaya dan tidak ada informasi ataupun data yang ditutupi (Mekarisce, 2020).

c. Kecukupan Referensi

Pengecekan kebenaran data yang menggunakan referensi yang didapatkan dengan menggunakan bahan dokumentasi, ataupun catatan yang sudah ada, peneliti menggunakan teknik ini guna mendukung data-data yang ditemukan dalam penelitian ini (Hadi, 2017). Keabsahan data itu sendiri merupakan data yang sama dari data yang didapat peneliti dengan apa yang sebenarnya ada di objek penelitian maka keabsahan data yang ditampilkan bisa dipertanggung jawabkan.